

PEMANFAATAN MODALITAS POLITIK REZKI MULFIATI LUTFI DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024

Mulawarman¹, Andi Naharuddin², Masni Banggu^{3*}, Fauzan Hidayatullah⁴, Tusriadi⁵

¹Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Andi Sudirman Watampone. Indonesia

²Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Terbuka. Indonesia

*Korespondensi: masnibanggu05@gmail.com

Citation (APA):

Mulawarman, Naharuddin, A., Banggu, M., Hidayatullah, F., & Tusriadi. (2023). Pemanfaatan Modalitas Politik Rezki Mulfiati Lutfi dalam Menghadapi Pemilu 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 161–169. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2974>

Email Authors:

mulawarman1403@gmail.com
ANaharuddin73@gmail.com
masnibanggu05@gmail.com
Hidayatullahfauzan23@gmail.com
Tusriadi@gmail.com

Submitted: 02 Desember 2023

Accepted: 08 Desember 2023

Published: 27 Desember 2023

Copyright (c) 2023 Mulawarman, Andi Naharuddin, Masni Banggu, Fauzan Hidayatullah, Tusriadi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan politisi perempuan untuk memanfaatkan modalitas politik dalam mendapatkan simpati masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data yang didapatkan melalui data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan modalitas yang dimiliki bisa mempengaruhi sikap pemilih dan dapat mengubah pandangan masyarakat melalui pengaruh yang dimiliki oleh seorang aktor dan partai politik. Memanfaatkan jaringan keluarga merupakan langkah tepat untuk mendapatkan dukungan politik dengan mengumpulkan basis massa khususnya dalam kegiatan sosialisasi politik dan kampanye politik. Begitupun juga modal politik yang dimiliki sebagai pemegang suara terbanyak di partai Nasinal Demokrat (Nasedem) sudah memiliki simpatian yang loyal dan lebih menguatkan kekuatan untuk mempertahankan suara pemilih, dan modal ekonomi sebagai faktor pendukung dalam kegiatan kampanye, terutama membiayai alat peraga kampanye, seperti media cetak dan media elektronik.

Kata Kunci: Modalitas; Politik; Aktor; Partai Politik; Gender

ABSTRACT

This research aims to find out what steps female politicians must take to utilize political modalities to gain public sympathy. The research method used is qualitative research with a descriptive analysis approach. Data obtained through primary and secondary data. The research results show that the modalities at hand can influence voters' attitudes and can change people's views through the influence of an actor and a political party. Utilizing family networks is the right step to gain political support by gathering a mass base, especially in political outreach activities and political campaigns. Likewise, the political capital he has as the holder of the most votes in the National Democratic Party (Nasedem) already has loyal sympathizers and strengthens his strength to retain voters' votes, and economic capital as a supporting factor in campaign activities, especially financing campaign props, such as print media. and electronic media.

Keywords: Modalities; Elections; Actors; Political Parties; Gender

PENDAHULUAN

Perempuan dan politik berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun pemimpin. Perempuan masih mengalami diskriminasi dalam politik, termasuk dalam hal akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik serta menduduki jabatan-jabatan politik. Namun, saat ini semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik dan memegang posisi penting di pemerintahan, baik di level nasional maupun internasional. Partisipasi aktif perempuan di politik penting untuk menciptakan kebijakan dan tindakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial secara

lebih luas. Politik perempuan merujuk pada gerakan atau upaya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam politik dan pemerintahan. Gerakan politik perempuan bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender dan keadilan sosial, serta memastikan bahwa suara perempuan didengar dalam pengambilan keputusan politik. Upaya politik perempuan meliputi berbagai strategi, seperti memperjuangkan hak-hak politik perempuan, meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik, mengadvokasi kebijakan publik yang lebih inklusif terhadap perempuan, serta memperjuangkan keadilan gender di seluruh sektor kehidupan. Tujuan politik perempuan adalah untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan merata bagi semua orang, termasuk perempuan.

Diskriminasi perempuan dengan memberikan perlakuan yang tidak adil atau merugikan terhadap perempuan, baik secara individu maupun sebagai kelompok, dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya, hanya karena mereka perempuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Perempuan sudah membuktikan diri kepada masyarakat bahwa kualitas, baik secara pengalaman, pendidikan sudah mengalami peningkatan dan memiliki kesetaraan dengan laki-laki, kualitas perempuan di era modern sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, sosial ekonomi, dan budaya, di era modern perempuan telah mencapai kemajuan besar dalam berbagai bidang dan kualitas mereka dapat mencakup kreatifitas dan kontribusi khususnya keterlibatan dalam dunia politik. Perjuangan untuk mendapat kesetaraan penuh antara semua jenis kelamin masih berlangsung sampai sekarang ini dan perempuan terus bekerja bersama dengan pria untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Gender yang menciptakan kesenjangan gender tersebut muncul pada masyarakat berbudaya patriarki. Budaya tersebut memposisikan laki-laki sebagai makhluk yang utama dalam pengambilan keputusan, budaya ini tentukan akan merugikan perempuan karena banyak keputusan yang tidak memberikan manfaat bagi perempuan (Handi Mulyaningsi, 2023:112).

Di Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, keterwakilan politisi perempuan sudah hampir memenuhi kuota 30%. Dari total 85 kuota kursi yang ada diparlemen provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 23 kursi diduduki oleh politisi perempuan dan laki-laki 62 kursi. Kuota 30 persen politik perempuan merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam bidang politik, terutama di lembaga legislatif dan eksekutif. Kebijakan ini mengamanatkan bahwa setidaknya 30 persen dari posisi politik harus diisi oleh perempuan. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan gender dan memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan politik. Tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan memerlukan kerja keras untuk mempertahankan atau meningkatkan angka keterwakilan pada pemilu 2024, tentunya modalitas dan kekuatan politik bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan suara di masyarakat.

Modalitas politik merujuk pada cara atau metode yang digunakan oleh pihak politik untuk mencapai tujuan politiknya, seperti penggunaan strategi kampanye, lobby, diplomasi, penggunaan kekuatan militer, dan sebagainya. Modalitas politik dapat mencakup berbagai tindakan, baik yang legal maupun ilegal, dan dapat berubah sesuai dengan situasi politik yang berkembang. Modalitas politik memiliki peran penting dalam politik karena mempengaruhi cara pihak politik mencapai tujuannya. Beberapa peran modalitas

politik dalam politik antara lain: Membentuk opini publik: Modalitas politik dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik melalui kampanye, pemberitaan media, atau sosialisasi, Mendorong partisipasi politik: Modalitas politik dapat merangsang partisipasi politik masyarakat melalui kampanye partisipasi, pemilihan umum, dan lainnya, Menentukan kebijakan publik: Modalitas politik dapat memengaruhi kebijakan publik melalui pendekatan lobby, diplomasi, atau penggunaan kekuatan militer. Mewujudkan keadilan sosial: Modalitas politik dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan melalui reformasi, aksi protes, dan demonstrasi. Dengan demikian, penggunaan modalitas politik dapat mempengaruhi cara pihak politik mencapai tujuan dan juga dampak pada masyarakat.

Melalui modal politik yang dimiliki politisi perempuan jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik pemenuhan kuota 30% politisi perempuan akan di dapatkan dengan mudah, khususnya salah satu politisi perempuan yang sudah lama berkecimpun di dunia politik yaitu Resky Mulfiati Lutfi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah memasuki periode kedua dan mencalonkan kembali pada pemilu 2024. Menjelang pemilu 2024 Resky Mulfiati Lutfi sudah gencar melakukan kampanye politik melalui media sosial, serta melakukan peninjauan kembali di berbagai daerah untuk menemui simpatisan yang ada di daerah pemilihannya, meskipun sebelumnya komunikasi yang dibangun terus dirawat dan dijaga untuk mempertahankan basis dukungan dari masyarakat. melihat permasalahan di atas terkait ketidak terpenuhannya kuota 30% politisi perempuan terpilih di Provinsi Sulawesi Selatan maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana pemanfaatan modalitas politisi perempuan Resky Mulfiati Lutfi untuk memenangkan kontestasi politik pada pemilu 2024.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana memanfaatkan modalitas politik politisi perempuan dalam memenangkan kontestasi politik pemilu 2024 Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar khususnya di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data yang bersifat melalui teknik pengumpulan data yang terdiri dari: Observasi, Dokumentasi serta wawancara calon anggota legislatif perempuan Rezki Mulfiati Lutfi periode 2024-2029. Dengan proses analisis data yang digunakan yaitu data dianalisis melalui empat cara: pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan kesimpulan atau (conclusion drawing and verification) (Burhan Bungin, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai Negara demokrasi, sistem politik Indonesia diatur oleh konstitusi Negara yaitu undang-undang dasar 1945 yang menetapkan kerangka kerja dasar untuk pemerintahan demokratis. Salah satu ciri Negara demokrasi adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat di tingkat nasional dan di tingkat daerah dan presiden, keterlibatan setiap warga Negara dalam proses politik merupakan hak politik oleh setiap warga Negara, keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung, keikutsertaan masyarakat dalam terlibat aktif dalam proses politik termasuk ikut mencalonkan sebagai anggota legislatif maupun presiden merupakan bukan hal yang mudah didapatkan untuk mendapatkan jabatan politik dibutuhkan perjuangan dan memiliki kemampuan modalitas yang cukup, termasuk kemampuan seorang figure termasuk popularitas menjadi hal yang penting dan bisa

mempengaruhi pemilih. Meskipun Indonesia diakui sebagai Negara demokrasi seperti halnya Negara demokrasi lainnya tetap terdapat tantangan dan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, seperti transparansi, partisipasi masyarakat dan pemberantasan korupsi. Sehingga demokrasi yang sehat perlu keterlibatan aktif dan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi.

Kekuatan modalitas politik yang dimiliki seorang politisi menjelang pemilu 2024 sudah mulai dikerahkan untuk mempertahankan posisi khususnya yang sudah lebih awal duduk di parlemen, begitupun juga politisi yang baru untuk mengikuti kontestasi politik. Khususnya politisi perempuan bukan hal yang mudah untuk mengubah stigma atau persepsi masyarakat terkait masyarakat yang masih memiliki pemikiran bersifat diskriminasi terhadap perempuan yang ingin menduduki jabatan politik. Perjuangan politisi perempuan dalam mendapatkan posisi yang sama dengan politisi laki-laki didukung oleh teori feminisme iartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminin termasuk pemanfaatan modalitas (Hastanti Widy Nugroho, 60) Melalui modalitas yang dimiliki diperlukan strategi yang tepat untuk memanfaatkan modalitas yang ada. Tentunya strategi politik sebagai rencana atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan politik mereka. Strategi politik melibatkan analisis situasi politik, penentuan tujuan, pemilihan tindakan yang tepat, dan pelaksanaan rencana tersebut dengan cara yang efektif. Contoh strategi politik meliputi penggunaan media massa, kampanye politik, lobi politik, dan dukungan dari kelompok kepentingan.

Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Kampanye Politik

Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu masyarakat dalam bentuk hubungan sosial, norma, nilai, kepercayaan, keterampilan, dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama dan saling bergantung satu sama lain (Robert Putnam, 1993), modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial dapat membantu masyarakat dalam berbagai bidang, seperti dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat sistem pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memperkuat partisipasi demokratis. Contoh modal sosial yang penting antara lain adalah jaringan hubungan sosial, seperti keluarga, teman, dan tetangga, serta norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat, seperti rasa saling percaya, toleransi, dan kerjasama. Modal sosial juga mencakup keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, seperti keterampilan berorganisasi, keterampilan berkomunikasi, dan pengetahuan tentang cara mengakses sumber daya dan layanan publik. Modal sosial merupakan faktor penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Jaringan keluarga dapat memiliki peran yang signifikan dalam politik, terutama dalam sistem politik yang didominasi oleh nepotisme dan patronase. Dalam konteks seperti itu, keluarga dapat membantu individu memperoleh akses ke kekuasaan politik dan sumber daya, serta membantu mempertahankan kekuasaan mereka. Dalam banyak kasus, jaringan keluarga dapat membantu kandidat memenangkan pemilihan dengan menyediakan dukungan finansial, logistik, dan dukungan kampanye. Di beberapa negara, seperti Indonesia, jaringan keluarga yang kuat dan terorganisir dapat membantu memenangkan jabatan politik pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Namun, ketergantungan

pada jaringan keluarga dalam politik juga dapat membawa dampak negatif, seperti meningkatkan korupsi dan menurunkan kualitas pengambilan keputusan politik. Selain itu, praktik nepotisme dan patronase juga dapat membatasi akses dan partisipasi politik bagi individu di luar jaringan keluarga yang dominan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mempromosikan praktik politik yang lebih transparan dan inklusif, yang tidak didasarkan pada jaringan keluarga atau hubungan personal semata (Shertiwan Oktri, 2021: 5).

Keluarga dapat menjadi kekuatan positif dalam politik, seperti ketika keluarga tersebut memainkan peran yang kuat dalam memperjuangkan hak asasi manusia atau menggalang dukungan untuk tujuan sosial atau politik yang positif. Selain itu keluarga juga dapat memainkan peran penting dalam politik, terutama dalam negara-negara yang memiliki sistem politik yang lebih otoriter atau korup. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga yang sama dapat memegang posisi politik yang berbeda-beda, atau satu anggota keluarga dapat menggunakan pengaruh atau kekuasaannya untuk membantu anggota keluarga yang lain. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya nepotisme, konflik kepentingan, dan ketergantungan yang berlebihan pada satu keluarga atau individu. Namun, ada juga contoh di mana keluarga dapat menjadi kekuatan positif dalam politik, seperti ketika keluarga tersebut memainkan peran yang kuat dalam memperjuangkan hak asasi manusia atau menggalang dukungan untuk tujuan sosial atau politik yang positif.

Selain dari itu jaringan keluarga dapat dimanfaatkan politisi perempuan untuk mengkampanyekan terkait budaya patriarki yaitu: Budaya patriarki adalah sistem sosial dan budaya di mana pria memegang kekuasaan dan kontrol yang lebih besar dibandingkan wanita. Budaya ini dapat tercermin dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, politik, ekonomi, agama, dan budaya populer. Dalam keluarga, budaya patriarki dapat dilihat dalam tradisi dan norma yang menempatkan pria sebagai kepala keluarga dan penentu keputusan yang dominan, sementara wanita seringkali diharapkan untuk memenuhi peran-peran tradisional seperti merawat anak dan rumah tangga. Dalam politik, budaya patriarki dapat tercermin dalam representasi politik yang tidak seimbang antara pria dan wanita, serta ketidaksetaraan gender dalam kebijakan dan pengambilan keputusan politik.

Ekonomi, budaya patriarki dapat tercermin dalam kesenjangan upah dan peluang kerja antara pria dan wanita, serta dalam pembagian pekerjaan yang kurang adil antara pria dan wanita dalam suatu organisasi. Dalam agama, budaya patriarki dapat tercermin dalam praktik-praktik yang mengekang wanita dalam hal penampilan, peran, dan status, serta pembatasan terhadap akses wanita terhadap kepemimpinan agama. Budaya patriarki telah menjadi perhatian masyarakat luas dan banyak upaya yang dilakukan untuk mengubahnya. Perubahan ini melibatkan pendidikan dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, perubahan budaya dan norma yang tidak adil, serta dukungan dan advokasi dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. bahwa budaya tersebut tidak lagi berlaku di Negara-negara yang demokrasi dan budaya tersebut harus dihilangkan, dan nantinya politisi perempuan memiliki keleluasaan mendapatkan simpati dari masyarakat.

Rezki Mulfiati Lutfi memulai karir politik di tahun 2019 dengan bergabung di partai Nasional Demokrat (Nasdem) mencalonkan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah daerah pemilihan Makassar B meliputi Kec. Biringkanaya, Kec. Tamalanrea, Kec. Manggala. Kec. Panakukang, Rezki Mulfiati

Lutfi berhasil mendapatkan kursi dengan total perolehan suara 15.644 pribadi dan 34.987 total suara partai sekaligus meraih suara terbanyak ke 6 dari total anggota DPRD terpilih. Menurut (Sorensen dan Torfing, 2023), modal politik mengacu pada kekuasaan individu untuk bertindak secara politis yang dihasilkan melalui partisipasi dalam proses politik yang interaktif sehingga melalui pemilu di tahun 2024 kembali dipercaya oleh partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk mengikuti kontestasi politik. Dengan memanfaatkan modal sosial dan politik yang dimiliki tetap yakin akan terpilih kembali untuk periode kedua dan bertekad akan berkontribusi lebih melalui pengalaman selama menjabat. Kedekatan dengan masyarakat dibangun dengan hubungan emosional sehingga merasa dirinya tidak memiliki sekat dengan masyarakat. Dengan membawa aspirasi masyarakat dengan membawa segala keluhan yang nantinya akan diusulkan oleh fraksi partai untuk dibahas bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hubungan emosional antara aktor politik dan partai politik, seperti pejabat publik atau calon politik, dengan konstituennya sangat penting dalam politik. Ini melibatkan pemahaman, keterbukaan, dan responsif terhadap kebutuhan, masalah, dan aspirasi konstituen untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan. Emosi, komunikasi, dan kepribadian aktor politik dapat memengaruhi bagaimana mereka dilihat oleh konstituennya, sehingga membangun hubungan yang kuat dan positif dapat memengaruhi kesuksesan politik. Hubungan emosional antara aktor dan partai politik dan konstituen adalah faktor penting dalam politik demokratis. Hubungan ini mencakup hubungan afektif (emosional) antara partai politik dan para pemilih atau konstituen mereka. Beberapa aspek penting dari hubungan ini meliputi: 1) Representasi: Partai politik berperan sebagai perantara antara konstituen dan pemerintah. Konstituen mengandalkan partai politik untuk mewakili kepentingan dan pandangan mereka dalam proses politik. 2) Kepercayaan: Konstituen harus merasa bahwa partai politik memiliki tujuan dan nilai yang sejalan dengan aspirasi mereka. Kepercayaan adalah aspek kunci dalam hubungan ini. 3) Komunikasi: Partai politik harus memiliki komunikasi yang efektif dengan konstituen mereka. Ini dapat melibatkan kampanye politik, berkomunikasi tentang kebijakan, dan berinteraksi dengan pemilih melalui berbagai platform, termasuk media sosial. 4) Responsif: Partai politik harus merespons kekhawatiran dan kebutuhan konstituen. Mereka perlu mendengarkan umpan balik, menanggapi masalah, dan beradaptasi dengan perubahan dalam pandangan konstituen. 5) Konsistensi: Hubungan emosional yang kuat memerlukan konsistensi dalam pendekatan dan pandangan partai politik. Konstituen ingin merasa bahwa partai politik tetap setia pada nilai-nilai dan komitmen mereka. 6) Keterlibatan: Partai politik dapat memperkuat hubungan emosional dengan konstituen dengan melibatkan mereka dalam proses politik. Ini bisa termasuk mengadakan pertemuan, diskusi, atau memungkinkan partisipasi dalam pemilihan kandidat.

Hubungan emosional yang kuat antara aktor, partai politik dan konstituen adalah kunci dalam menjaga demokrasi yang sehat dan efektif. Ketika konstituen merasa diperhatikan, diwakili, dan memiliki hubungan yang positif dengan aktor dan partai politik, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam proses politik, memberikan suara dalam pemilu, dan mendukung aktor dan partai politik yang mereka percayai. Sebagai legislator incumbent mengatakan bahwa "sebagai anggota dewan yang dipilih oleh rakyat tentunya sebagai representative rakyat melegetimasikan kekuasaan kepada wakil rakyat tentunya kebijakan yang akan diambil lebih kepada pro terhadap rakyat. Begitupun juga keterlibatan langsung dalam memberikan bantuan kepada masyarakat seperti pemberian bantuan alat pertanian, dan aktif dalam kegiatan social.

Kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin merupakan modal politik yang besar. Kepercayaan tersebut merupakan elemen kritis dalam dinamika kepemimpinan politik hal ini didasari pada etika dan moral yang dimiliki oleh seorang politisi sehingga menjadi dasar membentuk kepercayaan masyarakat termasuk janji politik yang pernah disampaikan seorang politisi pada saat kampanye, komitmen politisi Reski Mulfiati Lutfi pada pemilu 2019 akan memberikan efek terhadap pemilu 2024 yang akan datang. Di periode pertama kegiatan politik seperti reses terus dilakukan dengan tujuan untuk menyerap segala bentuk aspirasi dan masukan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kedepannya. Hal ini diungkapkan bahwa sebagai wakil rakyat yang telah diberikan amanah dan merasa sangat senang bisa bertatap muka dengan konstituen, bersilaturahmi berdialog dan berdiskusi. Ketika melakukan kunjungan ke beberapa lokasi banyak harapan-harapan masyarakat yang patut menjadi perhatian, termasuk pengurusan administrasi seperti pelayanan pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk hingga akte kelahiran.

Pemanfaatan Modal Ekonomi dalam Kampanye Politik

Modal ekonomi dapat memainkan peran penting dalam politik, terutama dalam sistem politik yang lebih cenderung korup atau yang memungkinkan pengaruh uang dalam pengambilan keputusan politik. Modal ekonomi dapat digunakan untuk mendanai kampanye politik, memenangkan dukungan politik, atau mempengaruhi kebijakan publik. Pemilik modal ekonomi, seperti korporasi atau individu kaya, dapat memberikan kontribusi keuangan yang besar kepada partai politik atau kandidat tertentu, atau bahkan mendanai kampanye independen yang menguntungkan kandidat atau isu tertentu. Kos politik pada pemilu adalah biaya yang dikeluarkan oleh kandidat atau partai politik dalam upaya memenangkan pemilihan. Biaya-biaya tersebut meliputi berbagai hal, seperti biaya kampanye, iklan politik, pemungutan suara, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kampanye.

Cost politik pada pemilu dapat sangat tinggi tergantung pada negara dan sistem politiknya. Beberapa negara memiliki batasan pada jumlah uang yang dapat dikeluarkan oleh kandidat atau partai politik dalam kampanye, sedangkan negara lain tidak memiliki batasan atau aturan yang lebih longgar. Di beberapa negara, kandidat bahkan dapat memenangkan pemilihan tanpa mengeluarkan biaya yang signifikan, terutama jika mereka memiliki basis dukungan yang kuat. Namun, terlepas dari sistem politiknya, kos politik yang tinggi dapat menjadi masalah dalam politik, karena dapat membatasi akses ke arena politik bagi kandidat yang kurang mampu secara finansial atau partai politik yang kurang terorganisir. Hal ini dapat mengarah pada pengaruh uang yang lebih besar dalam proses politik dan peningkatan risiko korupsi. Oleh karena itu, upaya-upaya dilakukan di berbagai negara untuk mengurangi kos politik pada pemilu, seperti dengan memberlakukan batasan pada kontribusi kampanye dan membatasi pengeluaran.

Menurut (Nascamern, 2001:18) mengatakan bahwa mahalnya *cost* politik dapat memicu dampak pada tindakan korupsi. Mengatur *cost* politik harus juga diperlukan perencanaan yang matang karena dari segi peruntukan jangan sampai dengan memiliki modal ekonomi yang kuat pengeluaran dana kampanye menjadi tidak terkontrol. Sehingga nantinya praktik politik uang akan terjadi, akan tetapi jika sebatas hanya untuk dipergunakan biaya seperti iklan politik, sosialisasi politik, atau biaya kunjungan ke daerah pemilihan tentunya melalui modal ekonomi dapat membantu dalam memenangkan kontestasi politik. Biaya kampanye yang dikeluarkan semua dikelola secara personal dan murni dari dana pribadi, hal ini dilakukan untuk

menghindari politik balas jasa ketika menerima bantuan dana dalam pihak lain, meskipun jumlah yang dikeluarkan bukan jumlah yang sedikit, terutama dalam pemilu di level Provinsi, khususnya di daerah pemilihan Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk relatif besar. Meskipun dalam dana kampanye sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan diperbolehkan mendapatkan sumbangan donasi dari kelompok politik, namun Reski Mulfiati Lutfi tetap mengandalkan dana pribadi melihat bahwa hal tersebut bukanlah hal yang sulit dengan kemampuan modal ekonomi (Reninta Ananda, 2021: 180).

Melalui dana kampanye yang dimiliki Reski Mulfiati Lutfi, dikelola dengan baik terutama memilih tim sukses yang solid untuk mendukung pemenangannya pada pemilu 2024, terutama memanfaatkan dana kampanye yang optimal dalam melakukan kunjungan ke berbagai tempat, khususnya di daerah pemilihan Makassar B yaitu Kecamatan Panakukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Kecamatan Manggala jika dilihat jumlah Daftar pemilih tetap dari keempat kecamatan tersebut kecamatan Biringkanaya memiliki jumlah DPT terbanyak yaitu 150.114. pemilih laki-laki 72.402, pemilih perempuan 77.712 yang tersebar dari 11 kelurahan dan 572 TPS. Sehingga Reski Mulfiati Lutfi bersama tim lebih banyak dikeluarkan dana di daerah tersebut.

Mengingat bahwa peluang untuk memenangkan kontestasi politik para politisi harus lebih memahami daerah potensial yang membisa membawa kemenangan, bukan berarti daerah-daerah lain tidak dilakukan kunjungan akan tetapi menempatkan tim sukses yang lebih banyak pada daerah potensial. Informasi yang didapatkan oleh tim pemenangan alat peraga kampanye seperti baliho sudah terpasang ke beberapa titik khususnya di daerah-daerah padat penduduk. Baliho ini merupakan salah satu alat promosi visual yang sering digunakan dalam kampanye politik dengan tujuan untuk meningkatkan visibilitas seorang kandidat atau partai politik. Hal ini baliho memberikan kehadiran fisik yang besar dan dapat terlihat dengan mudah di tempat-tempat yang strategis seperti pinggir jalan, persimpangan, atau alokasi publik lainnya, sehingga ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kandidat dan partai politik. Reski Mulfiati Lutfi dalam mengelola dana kampanye juga melakukan monitoring dan perawatan alat peraga yang terpasang, dengan tujuan memastikan baliho yang terpasang tetap dalam kondisi yang baik selama periode kampanye, monitoring secara teratur diperlukan untuk menggantikan dan memperbaiki yang rusak sehingga bisa juga meminimalisir jumlah anggaran yang dikeluarkan, jadi tidak sekedar menghamburkan uang untuk membiayai segala aktivitas kampanye.

SIMPULAN

Keikutsertaan politik perempuan dalam era demokrasi merupakan bagian dari pemenuhan hak politik perempuan untuk ikut berpartisipasi dan mengambil bagian dalam perumusan kebijakan, sehingga kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam politik tidak ada lagi sekat yang membedakan, hak terkait politik baik memilih dan dipilih tidak dibedakan namun dalam kenyataannya kesulitan politisi perempuan dalam memenuhi kuota 30% masih terhalang khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilu 2019 belum terpenuhi, salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya diskriminasi terhadap jender, politisi perempuan masih dipandang sebelah mata untuk terjun langsung dalam dunia politik maka dari itu melalui pemilu 2024 perempuan memiliki kesempatan untuk membangun sebuah komunikasi dengan pemilihnya

dengan meyakinkan bahwa perempuan juga bisa menduduki jabatan politik melalui dukungan modalitas yang dimiliki seperti modal sosial politik dan ekonomi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Reninta. Teuku Rika, Valentina. 2021. Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal Desentralisasi Kebijakan Publik (DJKP)*.
- Bungin. Burhan. 2008. *Analisis Dan Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada.
- Hania, Hanafi. Ana Sabhana Azmy. 2018. *Kekuatan-Kekuatan Politik*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hariti, Siti Sastriani. 2009. *Gender And Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hiplunudin, Agus. 2019. *Politik Gender*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Indira, Canna Giscka, Chusnul Mariyah. 2021. Analisis Modal Politik, Sosial, Ekonomi, Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan Pemula Pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2019. *The journalish: Sosial And Government*. S
- Martin. Lipset Seymour. 2007. *Politikal Man*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyaningsih, Handi. 2023. Modalitas Calon Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin (Studi Partai di Partai Golkar, PKB, PDIP) Daerah Pemilihan Lampung. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*.
- Noni, Natadia Ernel. 2018. Realitas Cost Politik Partai Lama Sebagai Pembanding Imajinasi Partai Pemula. *Kemudi. Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 2 No. 02 Februari 2018.
- Octri Sertiwan. 2021. Modalitas Dalam Kontestasi Politik. *JOM FISIP Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021*.
- Samadinata, R. Widya Setiabudi. 2016. *Jurnal Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014*.
- Subakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana.
- Widy. Hastanti Nugroho. 2004. *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*. Yogyakarta: Hanggar Kreatif.
- Zainuddin, Rahmat, Robert, Dhal. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

PROFIL SINGKAT

Saya sebagai penulis pertama yang bernama Mulawarman, S.IP., M. Si. Lahir di Lagoga Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Maret 1988, sekarang ini menjadi dosen tetap di Universitas Andi Sudirman Watampone dan menjadi dosen LB di Subdirektorat Perkuliahan Bersama Universitas Hasanuddin Makassar.